# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan pada laporan kerja praktek yang penulis lakukan selama ini di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung, penulis menyimpulkan;

1. Pembelian barang pada Koperasi Pegawai Pemerintah Propinsi Jawa Barat (KPPP) sudah cukup baik, ini dilihat dari prosedur koperasi yang dimulai dengan pemilihan pemasok, melakukan penawaran harga, dan melakukan pengecekan barang serta pemilihan barang yang baik. Dan bagian pembelian dilakukan dengan bagian-bagian yang terkait yang bekerja sama sesuai dengan fungsinya, bagian tersebut antara lain bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan, dan bagian akuntansi.

2. Prosesdur pemberian kredit pada unit simpan pinjam di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung adalah anggota yang mengajukan kredit uang membutuhkan waktu sebulan untuk menerima kredit uang yang akan di pinjam. Lamanya prosedur tersebut dikarenakan pencatatan yang jelas oleh divisi-divisi dan analisa yang jelas untuk anggota yang meminjam. Apabila gaji yang tersisa memungkinkan atau lebih besar jumlahnya dari jumlah kredit yang di pinjam, maka koperasi akan memberikan izin untuk permintaan kredit tersebut. Namun bila gaji anggotanya yang bersangkutan tidak sebanding dengan jumlah kredit yang akan di pinjam maka koprasi

tidak akan memberikan kredit uang yang telah di ajukan anggota. Hal tersebut dikarenakan sistem pengembalian kredit uang melalui pemotongan gaji.

## 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan sistem pembelian barang dilakukan oleh masing-masing bagian yang terkait, tidak menitik beratkan pada bagian pembelian saja. Hal ini untuk mempermudah dan memperlancar koperasi dalam melakukan kegiatan pembelian barang. Dalam melakukan pembelian barang Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan penentuan harga standar barang yang dibeli dan pemilihan pemasok yang tepat. Hal ini untuk membantu Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung memperoleh harga yang sesuai serta kualitas barang yang baik.

2. Sebaiknya dalam pelaksanaan sistem perkreditan barang Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (KPPP) melakukan berbagai kebijakan baru, seperti jumlah minimum dan maksimum pengkreditan barang yang di perbanyak kuantitasnya, sehingga bagi para anggota koperasi dapat lebih leluasa dalam memilih sIstem pengkreditan barang yang berlaku sesuai dengan prosedur yang ada.